

H U K U M B I S N I S

OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BEBERAPA ASPEK HUKUM DALAM PASAR MODAL

**Aspek Hukum *Rights Issue* sebagai Sumber Pembiayaan dalam
Perspektif UU No. 8/1995 & Peraturan Perundangan lainnya**

**Analisis Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan
Pasar Modal**

Aspek Hukum Reksadana dalam Pasar Modal Indonesia

**Tanggung Jawab Perusahaan Efek Selaku Manajer Investasi dan
Perlindungan Dana Nasabah di Pasar Modal**

Memahami Aspek Hukum *IPO* dan *Right Issue*

***Legislating from the Bench* : Mahkamah Agung RI dan Perlindungan
terhadap Merek Terkenal**

UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

**Kep-429/BL/2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu**

Kep-26/PM/2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Dewan Redaksi

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH
Soehadibroto, SH
Drs. Normin S. Pakpahan, SH., MBA
Dr. Dono Iskandar Djojosebroto
Dr. Tjip Ismail, SH., MH

Dewan Pakar

Koordinator: Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M, Ph.D
Wakil Koordinator: Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH
Anggota (alfabetis):
Prof. A. Zen Umar Purba, SH., LL.M
Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL
Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH
Prof. Dr. Djenal Sidik Suraputra, SH
Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH
Dr. Dono Iskandar Djojosebroto
Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH., LL.M
Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LL.M
Prof. Mardjono Reksodiputro, SH
Prof. Dr. H. Priyatna Abdurasyid, SH., Ph.D
Dr. R.B. Suhartono
Dr. Rizal Ramli
Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH
Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH
Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH
Prof. Dr. Valerie J.L. Kriekhoff, SH, MA
Dr. Veronica Komalawati, SH, MH
Yahya Harahap, SH

Pelaksana Penerbitan

Pemimpin Umum/Redaksi: Dr. W. Djuwita Ramelan
Wakil Pemimpin Umum: Dr. Myrna Laksman - Huntley
Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Ali Jusmono, M.Sc
Produksi:
Tb. Ade Rosidin
Pemasaran & Sirkulasi:
Tamnuji Wiguno, Hasanudin
Keuangan & Sekretaris:
Herlina, SE

Isi Nomor Ini

Pengantar.....3

Editorial

OJK dan Masa Depan Pasar Modal4

Artikel Utama

Dr. Gunawan Widjaja, S.H., M.H., M.M.

Aspek Hukum *Rights Issue* sebagai Sumber Pembiayaan
dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Perundang-
undangan lainnya5

Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A.

Analisis Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan
Pasar Modal 14

Irna Nurhayati, S.H., M.H., LL.M.

Aspek Hukum Reksadana dalam Pasar Modal Indonesia 25

Cenuk Widiyastisna Sayekti, S.H., M.H.

Tanggung Jawab Perusahaan Efek Selaku Manajer Investasi dan
Perlindungan Dana Nasabah di Pasar Modal 37

Christian Andersen, S.H., M.Kn. &

Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum.

Memahami Aspek Hukum *IPO* dan *Rights Issue* dalam
Perspektif UU No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Perundang-
undangan lainnya 46

Artikel Pendamping

Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H.

Legislating from the Bench: Mahkamah Agung RI dan
Perlindungan Terhadap Merek Terkenal 55

Peraturan Perundang-undangan

UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 67

KEP-429/BL/2009 tentang Penambahan Modal Tanpa

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu..... 113

KEP-26/PM/2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ... 115

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang relevan dengan pengembangan Hukum Bisnis. Tulisan harus asli (bukan plagiat) hasil pemikiran, penelitian, atau pendapat hukum yang disertai penyebutan acuan/pustaka sebagaimana layaknya tulisan ilmiah, dan belum pernah dipublikasikan pada penerbitan lain. Tulisan diketik spasi ganda maksimum 20 halaman A4, dikirimkan dalam bentuk disket dan *print-out* ke alamat kami, Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 3, Wing B, No. 316B, Jl. Gatot Subrata, Senayan, Jakarta 10270 atau melalui e-mail: jhb@bit.net.id. Tulisan yang tidak dimuat dalam dua nomor penerbitan berturut-turut dapat diterbitkan di jurnal lain dengan pemberitahuan kepada kami. Keputusan Redaksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.

TITON SLAMET KURNIA, S.H., M.H.

LEGISLATING FROM THE BENCH: MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL

Legal protection of brands (local or popular) is the mandate of the Treaty of TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) that have been ratified by the Government of the Republic of Indonesia. It is an indication of the presence of law reform in Indonesia. Three main things that happen in law reform in Indonesia. They are the reform of legal products, reform of the legal apparatus and the reform of the legal culture. A constraint in practices of law enforcement still happens, e.g. against intellectual property rights is a reality but the process of law reform in Indonesia was still going on. Therefore improvement of the rule of law continues to be implemented by the institution of law such as the supreme court as the highest institution of law enforcement in Indonesia.

The Supreme Court of the Republic of Indonesia in the practice of brands (famous) protection as reflected in its decisions is very concerned about TRIPs Agreement. In providing protection against well-known brand held by the Supreme court is very advanced, even in situations where existing regulations stating otherwise. In cases of protection against famous brand can be concluded that the supreme court has done practices legislating from the bench. The practice of the Supreme Court in the legal protection of well-known brand can inspire other cases in order to restore public trust against judicial institution.

Perlindungan hukum terhadap merek (lokal atau terkenal) adalah amanah dari perjanjian TRIPs yang telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia. Hal ini merupakan indikasi adanya reformasi hukum di Indonesia. Tiga hal utama yang terjadi dalam reformasi hukum di Indonesia ialah: reformasi produk hukum, reformasi aparatur hukum dan reformasi budaya hukum. Di dalam praktik masih terjadi kendala dalam penegakan hukum, misalnya, terhadap Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu kenyataan yang harus diakui tetapi proses reformasi hukum di Indonesia masih terus berjalan. Oleh karena itu perbaikan penegakan hukum terus dilaksanakan oleh institusi hukum seperti Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penegakan hukum di Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam praktik perlindungan terhadap merek (terkenal) sebagaimana tercermin dalam putusan-putusannya adalah sangat memperhatikan perjanjian TRIPs. Dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal MARI berpendirian sangat maju, bahkan dalam situasi saat peraturan perundang-undangan yang ada menyatakan sebaliknya. Dalam kasus-kasus perlindungan terhadap merek terkenal dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan praktik "*legislating from the bench*". Praktik Mahkamah Agung dalam rangka perlindungan hukum terhadap merek terkenal dapat menginspirasi kasus-kasus yang lain dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial.

I. PENDAHULUAN

Tulisan ini mengulas sedikit mengenai *judicial history* Indonesia, yaitu tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan isu perlindungan internasional terhadap merek terkenal dalam forum yurisdiksi nasional Indonesia. Tujuan tulisan ini adalah untuk menunjukkan perkembangan hukum di Indonesia dengan dimotori oleh MARI melalui *case law*-nya yang menurut penulis lebih progresif ketimbang aturan hukum positif yang ada (*TRIPs Agreement*¹ itu sendiri beserta transfor-

masinya melalui legislasi) guna menjawab isu perlindungan terhadap merek terkenal.

Tulisan ini berargumen bahwa Indonesia memiliki komitmen yang besar dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal sebagaimana tercermin dalam putusan-putusan MARI. Dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal MARI berpendirian sangat maju, bahkan dalam situasi saat peraturan perundang-undangan yang ada menyatakan sebaliknya. Pernyataan ini merujuk pada masa sebelum keikutsertaan Indonesia dalam *TRIPs Agreement* dan secara spesifik pada praktik reservasi atas keikut-

1 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights